



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PRUBUMULIH TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.072.636.419.816,00, yang bersumber dari:

- (1) Pendapatan asli daerah;
- (2) Pendapatan transfer;
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.815.712.403,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.612.712.403,00.

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.756.000.000,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.837.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.610.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.612.712.403,00., yang terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp.16.823.229.400,00
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp.18.044.483.003,00
 - c. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 780.000.000,00
 - d. Pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00
 - e. Pajak hiburan direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00
 - f. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00
 - g. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp.16.650.000.000,00
 - h. Pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00
 - i. Pajak parkir direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00
 - j. Pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00
 - k. Pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00
 - l. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp. 3.750.000.000,00
 - m. PBBP2 direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00
 - n. BPHTB direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.756.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 2.621.000.000,00
 - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 635.000.000,00
 - c. Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar

Rp.4.500.000.000,00

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.837.000.000,00, yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.610.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00
 - b. Jasa giro direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00
 - c. Pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp. 14.500.000.000,00
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00
 - e. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 59.800.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 901.820.707.413,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 847.722.539.816,00
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.098.167.597,00

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.847.722.539.816,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 10.198.798.000,00.
 - b. Dana Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp. 14.409.895.000,00.
 - c. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.287.779.266.102,00.

- d. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp.449.970.635.000,00.
 - e. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp.85.363.945.714,00.
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.098.167.597,00, yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 39.453.167.597,00
 - b. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp.145.000.000,00.
 - c. Pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan Rp.14.500.000.000,00.

Pasal 7

Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.172.636.419.816,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 967.773.449.464,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 569.909.832.395,00
- (3) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 383.826.377.795,00

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 208.050.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.565.189.274,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 264.000.000,00

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 126.038.267.352,00, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 837.500.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.147.641.342,00
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.485.315.000,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.778.649.000,00
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.789.162.010,00.

Pasal 10

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.280.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d

direncanakan sebesar Rp. 71.544.703.000,00, terdiri atas belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa

Pasal 12

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00 dalam Pasal 1 huruf c, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000,00.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 100.000.000.000,00).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
7. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
8. Lampiran VIII : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
9. Lampiran IX : Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos;
10. Lampiran X : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 17

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih

Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH



Diundangkan di Prabumulih pada

Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH



ARIS PRIADI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 NOMOR 1



KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170.815.712.403,00
4.1.01	Pajak Daerah	78.612.712.403,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.823.229.400,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	16.823.229.400,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	16.823.229.400,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	18.044.483.003,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	18.044.483.003,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	18.044.483.003,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	780.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	780.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	780.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.200.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.200.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.200.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	900.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	900.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	900.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16.650.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.400.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.400.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	250.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	250.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.750.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.750.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.750.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.500.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.500.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.500.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.756.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.621.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	301.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	300.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	25.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	635.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	610.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	110.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.500.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.837.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.837.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.837.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.837.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.610.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	10.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.300.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.300.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.300.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	14.500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	14.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	14.500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	59.800.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	59.800.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	59.800.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	901.820.707.413,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	847.722.539.816,00
4.2.01.05	Dana Desa	10.198.798.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	10.198.798.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	10.198.798.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.409.895.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	14.409.895.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	14.409.895.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	287.779.266.102,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	101.170.050.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	85.818.887.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.351.163.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	178.965.979.102,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	51.223.976.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	393.561.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	125.693.583.102,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	557.704.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.097.155.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	7.643.237.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	7.643.237.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	449.970.635.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	380.959.019.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	380.959.019.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	69.011.616.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	29.314.098.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	14.293.107.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.225.883.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.578.528.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	85.363.945.714,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	85.363.945.714,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	29.879.100.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.302.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.889.897.900,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	169.872.814,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.925.400.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.080.400.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.430.129.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	6.948.773.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.943.631.000,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	388.242.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.098.167.597,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.098.167.597,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.098.167.597,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.453.167.597,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	145.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.072.636.419.816,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	967.773.449.464,00
5.1.01	Belanja Pegawai	569.909.832.395,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	382.922.455.804,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	293.806.965.115,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	191.802.007.258,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	102.004.957.857,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.253.282.058,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.637.237.574,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.616.044.484,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.633.823.439,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.471.298.989,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	162.524.450,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.216.911.876,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.008.161.876,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	208.750.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.631.462.318,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.205.506.980,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.425.955.338,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.673.146.236,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.922.291.846,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.750.854.390,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.513.731.433,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.287.099.977,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.226.631.456,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.442.087,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.710.141,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.731.946,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.334.762.879,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.219.362.879,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.115.400.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	595.478.732,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	403.898.732,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	191.580.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.251.449.631,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.114.329.631,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.137.120.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	155.512.694.105,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	118.121.120.141,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	118.121.120.141,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.391.573.964,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	91.500.000,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	83.900.000,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	39.000.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	300.000.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	15.000.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	615.000.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	17.500.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	4.000.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20.000.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	318.750.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	34.889.897.900,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	169.872.814,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	827.153.250,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.819.172.205,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	92.992.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	92.992.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.637.840,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.637.840,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.303.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.303.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	509.204.565,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	509.204.565,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.620.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	66.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.554.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.824.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.824.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	95.970.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	95.970.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.509.973.927,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	98.436.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	98.436.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.781.040,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.781.040,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	177.184.800,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	177.184.800,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	20.548.041,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	20.548.041,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.200.022.027,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.200.022.027,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.019,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.019,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	7.364.460.688,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	6.594.060.688,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	6.594.060.688,00
5.1.01.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	500.000.000,00
5.1.01.89.02.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	500.000.000,00
5.1.01.89.03	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	270.400.000,00
5.1.01.89.03.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	270.400.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.179.475.666,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.179.475.666,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.179.475.666,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.826.377.795,00
5.1.02.01	Belanja Barang	76.367.991.878,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.116.732.467,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	561.460.055,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	530.460.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.110.281.230,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	590.832.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	69.264.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	201.805.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.048.386.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.003.189.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	482.042.390,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	65.160.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	25.695.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.937.580.495,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.603.532.057,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	469.070.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	111.830.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	758.118.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	814.943.400,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	289.284.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	128.580.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	71.980.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	160.740.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.034.469.480,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	293.795.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.104.531.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	127.215.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.868.551.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.392.634.500,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.656.708.060,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	270.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.449.020.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	255.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	560.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	107.250.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	804.300.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	139.750.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	9.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	209.181.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	308.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.213.128.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	203.465.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	60.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	47.487.300,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	37.987.300,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	9.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.203.772.111,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	9.902.250,00
5.1.02.01.04.0111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	5.000.000,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	50.227.200,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	63.237.661,00
5.1.02.01.04.0119	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	825.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	239.330.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.000.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	9.670.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	177.870.000,00
5.1.02.01.04.0125	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	28.400.000,00
5.1.02.01.04.0128	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	57.000.000,00
5.1.02.01.04.0134	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	29.000.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	36.700.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	166.400.000,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	190.060.000,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	17.000.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30.200.000,00
5.1.02.01.04.0494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	7.950.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	72.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	111.416.892.592,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.603.794.192,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	939.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.511.846.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.522.170.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	243.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	99.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	205.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	664.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.773.738.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.632.248.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.562.630.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	622.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	264.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	33.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.717.548.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	117.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	926.454.200,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.997.586.648,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.972.535.400,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	270.900.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	38.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.082.100.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	105.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	156.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	131.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	169.675.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.489.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	450.808.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	905.447.440,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.698.184.260,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	745.845.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.552.898.244,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.750.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	400.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	728.800.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	515.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.547.470.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	654.160.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	66.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	16.760.989.400,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	250.000.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.744.080.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	504.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.800.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	439.106.400,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	971.025.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	331.978.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	504.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.345.388.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	333.700.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	188.176.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	107.200.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.387.762.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	108.800.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	11.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	190.000.000,00
5.1.02.02.04.0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	18.750.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.968.595.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.404.850.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	275.700.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	22.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	265.545.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	307.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	307.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.788.976.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	358.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	603.248.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	216.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.511.090.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	600.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	922.848.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.311.090.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	266.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	910.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	910.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.617.965.000,00
5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	1.617.965.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	173.620.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	158.820.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	14.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.936.565.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.294.890.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.142.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.499.675.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.865.641.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.108.616.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.299.480.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	92.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.705.640.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.496.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.107.025.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.107.025.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	650.000.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	650.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	91.884.181.681,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.184.181.681,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.981.458.566,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.391.925.115,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.767.098.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.700.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	700.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	700.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.811.930.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358.450.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	132.450.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	226.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.453.480.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.917.480.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	16.536.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	16.500.102.560,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	15.690.102.560,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	15.690.102.560,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	600.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	600.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	210.000.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	210.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.121.619.750,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.121.619.750,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.121.619.750,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.858.018.334,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.858.018.334,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.858.018.334,00
5.1.04	Belanja Subsidi	208.050.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	208.050.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	208.050.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	208.050.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.565.189.274,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.295.540.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	900.540.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	900.540.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.395.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.395.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.240.578.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.665.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.665.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.575.578.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.575.578.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.029.071.274,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.029.071.274,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.029.071.274,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	264.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	264.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	264.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	264.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	126.038.267.352,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	837.500.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	837.500.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	837.500.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	162.500.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	675.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.147.641.342,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	90.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	90.000.000,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	90.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11.854.536.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.854.536.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.959.374.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.030.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	250.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	615.162.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	20.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	20.000.000,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	20.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.180.349.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	880.849.000,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	33.600.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	138.590.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	708.659.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.840.717.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.071.944.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	751.350.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	878.033.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	139.390.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	458.783.600,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	285.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	77.750.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	96.033.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.580.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	24.580.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	24.580.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	786.492.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	86.492.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	86.492.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	700.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	700.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	68.000.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	68.000.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	68.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.641.083.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.449.155.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	477.295.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	971.860.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	191.928.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	191.928.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	686.420.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	686.420.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	686.420.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.533.674.742,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.233.674.742,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.233.674.742,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	300.000.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	300.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.262.506.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.262.506.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.262.506.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.485.315.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	21.565.315.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.205.315.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.406.585.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.348.730.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	450.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	360.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	360.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	420.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	420.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	420.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.778.649.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.718.374.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	45.858.614.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	45.858.614.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.859.760.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.859.760.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.815.050.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.815.050.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.973.050.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.842.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	906.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	900.000.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	900.000.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	6.000.000,00
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	6.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	10.339.225.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.350.000.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.350.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	8.989.225.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	4.990.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.999.225.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.789.162.010,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.789.162.010,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.063.762.010,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.063.762.010,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	425.400.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	425.400.000,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	300.000.000,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	300.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.280.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.280.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.280.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.280.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.280.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	71.544.703.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	71.544.703.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.544.703.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.544.703.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.198.798.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	61.345.905.000,00
	Jumlah Belanja	1.172.636.419.816,00
	Total Surplus/(Defisit)	-100.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.000.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	14.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0181	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi	14.000.000.000,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.000.000.000,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	11.000.000.000,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00
6.1.01.03.01.0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	75.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	65.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	30.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.000.000.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	100.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Prabumulih, 6 Januari 2025

